



ADR DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
PADA MASA KINI DAN MASA YANG DATANG

Oleh :

Aminah, SH, Msi

Naskah disampaikan dalam seminar pada tgl 19 Juni 1999
di Unisula Semarang

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft.	2971/RI/FH/c
Tgl.	13/206

ADR dalam pengelolaan lingkungan pada masa kini dan masa yang datang *)

oleh : Aminah, SH, MSI

a. Tantangan Pengelolaan Lingkungan

Sebagaimana dicemaskan oleh banyak kalangan, persoalan lingkungan di Indonesia akan menjadi semakin berat karena krisis ekonomi yang berkepanjangan. Karena penurunan kegiatan industri yang menggunakan banyak bahan baku import, sehingga orientasi kegiatan industri dan perekonomian Indonesia akan diarahkan pada eksploitasi sumberdaya alam. Lebih lanjut, dikhawatirkan bahwa proses-proses eksploitasi sumber daya alam di Indonesia akan semakin tak terkendali dan disyahkan dengan dalih pemulihan ekonomi nasional yang terpuruk. Dengan kata lain, tantangan yang dihadapi oleh para pengelola lingkungan di Indonesia akan semakin berat, terutama oleh karena desakan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar yang perlu segera ditangani. Isu-isu lingkungan menjadi tidak atau kurang berarti oleh karena orientasi pemerintah dan juga masyarakat yang lebih pada persoalan kehidupan sehari-hari. (Bakti Setiawan, 1999). Hal tersebut dipertegas oleh Sudharto PH (1999) Pada masa krisis sekarang ini timbul kondisi yang mengarah pada situasi "environment negligence" (Ketidakpedulian atau pengabaian lingkungan). Pada tingkat kebijakan, alokasi dana maupun perhatian pada aspek lingkungan makin tidak memperoleh porsi yang seimbang dengan bidang-bidang lain. Sedangkan pada tataran masyarakat, lingkungan makin tidak dipandang penting karena sebagian besar masyarakat harus bisa berlutut untuk bisa "survive". Dari kondisi di atas, baik pada tataran mikro maupun makro, lingkungan kemudian menjadi tumpuan untuk bisa mempertahankan hidup. Tak pelak lagi, eksploitasi pada lingkungan akan semakin meningkat.

*) Modifikasi untuk Sistem Lingkungan di UNISSI, A. Suroso, Tanggal 12 Juni 1999

Di sisi lain negara kita akan senantiasa terpuruk dan ketinggalan dengan negara-negara lain jika tidak mampu bersaing dalam era globalisasi. Untuk itu kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin agar dapat menarik investor asing ke negara kita, hal ini juga merupakan tantangan yang cukup berat dan perlu kiat-kiat tersendiri

Meskipun demikian, sebenarnya kita harus tetap optimis dengan melihat proses-proses perubahan politik di Indonesia saat ini dan menjadikannya sebagai peluang bagi upaya-upaya untuk menyelamatkan lingkungan dan menuju pembangunan yang berkelanjutan. (Bakti Setiawan, 1999).

Dalam konteks tersebut di atas, paling tidak ada tiga hal penting yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di Indonesia. Pertama adalah kecenderungan akan meningkatnya kedaulatan rakyat atau berkurangnya pemusatan kekuasaan pada

pemerintah. Proses ini sangat berarti bagi pengembangan pengelolaan lingkungan karena memungkinkan dikembangkan model-model pengelolaan bersama serta direalisasinya hak-hak masyarakat, sebagaimana banyak dikritik, pemusatan kekuasaan pada pemerintah tidak memungkinkan dilakukannya kontrol terhadap penyimpangan-penyimpangan pembangunan yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan. melalui kedaulatan rakyat, proses kontrol ini akan menguat.

Kedua, proses demokratisasi yang terjadi juga diharapkan akan mempunyai implikasi yang positif bagi upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Proses demokrasi yang berarti memungkinkan proses negosiasi konflik secara adil dan terbuka dan diharapkan memberi peluang bagi para pendekar lingkungan untuk menyuarakan pendapat, aspirasi, serta kepenjingannya. Selama ini terdapat kecenderungan bahwa proses-proses penyelesaian konflik lingkungan dilakukan

melalui kekuasaan. Hak-hak masyarakat yang lemah, minoritas, dengan demikian cenderung dikalahkan.

Terakhir, proses perubahan politik yang menekankan pada diberlakukannya "*rule of law*" atau penegakan hukum diharapkan akan mempunyai dampak positif bagi upaya-upaya pengelolaan lingkungan. Sebagaimana selama ini dikritik, "*law enforcement*" berbagai product perundangan dan peraturan di bidang lingkungan sangatlah lemah, terutama karena begitu kuatnya praktek-praktek KKN (Bakti Setiawan, 1999)